Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 1 Nomor 3 2019

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Upaya Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan APBDes Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah di Kabupaten Malang

Kharisma Dian Asmarani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Kharismadian34@gmail.com

Abstrak

This writing aims to determine the practice of Village Budgeting and Income Budgeting in Madiredo Village, Pujon District, Malang Regency. Preparation of APBDes is one of the formation of village regulations involving the Village Government and BPD. APBDes preparation is very important, mandatory, and is needed in every region including villages, according to the needs and benefits of the community, this is in line with the principles of fiqh siyasah Maliyah. This research method is empirical juridical, with sociological juridical approach. Research data described descriptively. Data collection uses interview techniques, library research and documentation and uses descriptive analysis data analysis techniques. The results of this study indicate that the preparation of the Village Budget for income and expenditure in the village of Madiredo, Pujon District, Malang Regency in its stages or preparation system has been broadly in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning villages, but in the preparation of the district health center in Madiredo there are still many problems that arise and the efforts of the village government and the BPD in the preparation of the district health program are by conducting training, socializing village youth and the community, appointing village officials to take part in training in the sub-district, holding hamlet and village meetings, providing intensive assistance to village officials.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Penyusunan APBDes merupakan salah satu pembentukan peraturan desa yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD. Penyusunan APBDes sangat penting, wajib, dan dibutuhkan setiap daerah termasuk desa, sesuai kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, hal tersebut sejalan dengan prinsip *fiqh siyasah Maliyah*. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian data diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data

menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang dalam tahap atau sistem penyusunannya sudah secara garis besar sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, namun dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo masih sering terdapat masalah yang timbul di dalamnya dan upaya Pemerintah desa dan BPD dalam penyusunan APBDes adalah dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi pemuda desa dan masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan, mengadakan rapat di setiap dusun dan desa, memberikan bantuan intensif kepada para perangkat desa.

Kata Kunci: dana desa; pemerintah desa; Fiqh Siyash Maliyah

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya sendiri.¹ Sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat (1) adalah mengatur adanya pembagian daerah dengan susunan pemerintahan yang bersifat otonom yang ditetapkan oleh undang-undang. Otonomi daerah sering kali dianggap sebagai opsi atau jalan yang tepat untuk meningkatkan distribusi kewenangan secara proposional pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan asset, politik dan sumber daya lokal.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia di Indonesia, daerah di indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan yang terendah adalah desa. Pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat. Kerangka otonomi daerah adalah salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan.

Desa merupakan suatu wilayah yang diberi wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri, namun bukan berarti pemerintah desa lepas dari peraturan dan undang-undang yang berlaku, melainkan pemerintah desa dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi ini adalah upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, mengingat pemerintah desa adalah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan juga lebih mengetahui tentang kebutuhan dan keluhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.² Pemerintah Desa ini sebagai

¹ HAW, Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, cetakan keenam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 1.

² Pasal 200 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu unsur dalam pemerintahan desa, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sendiri merupakan bagian dari Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan Pembiayaan Desa.³

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini adalah sebagian tugas dari Pemerintah Desa, namun dalam penyusunan APBDes Kepala Desa tidak lagi mendominasi dalam tahap pengajian rancangan kebijakan, pembahasan dan pelaksanaannya. Karena harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, memperhatikan usulan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis guna membahas rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁴

Relasi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah mitra artinya dalam menjalankan pemerintahan desa Pemerintah Desa harus bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan peraturan desa termasuk dalam penyusunan APBDes.⁵ Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan APBDes mempunyai peranan penting dalam penyusunan APBDes. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan berpedoman pada peraturan Desa yang berlaku. Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan persoalan yang timbul terkait dengan penyusunan APBDes.⁶

Untuk itu perlu diteliti bagaimana upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Persepektif Fiqh Siyasa Maliyah.

Metode Penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan

³ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 73 ayat (1)

⁴ Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4)

⁵ Mahfud (Kepala Desa Madiredo), Wawancara (Balaidesa Madiredo 24/03/2019).

⁶ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). hlm.51.

penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris, dengan cara terjun langsung ke obyeknya, maka dalam penelitian ini pendekatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sumber data di peroleh adalah dari data primer yakni diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD, Perangkat Desa dan masyarakat Desa Madiredo dan dengan data sekunder yakni kamus-kamus, buku, dan skripsi. Penelitian data diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika yang terjadi.⁸

Hasil dan Pembahasan

Upaya dan Analisis Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 dan di Desa Madiredo Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes secara jelas sudah diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan Desa dalam kurun waktu satu tahun yang wajib di susun oleh Desa⁹, dalam hal ini sudah jelas bahwa APBDes di setiap desa di Indonesia wajib di susun setiap tahunnya, termasuk Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Secara eksplisit dalam tahapan-tahapan penyusunan APBDes ini juga menjelaskan fungsi dan tugas dari masing-masing lembaga desa. Dimana masing-masing lembaga desa memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam tahap-tahap penyusunan APBDes. Berikut ini adalah proses penyusunan APBDes yakni, Kepala desa bertugas menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi nya, setelah RPJMDesa di tetapkan kepala desan BPD menyusun rancangan kerja pemerintah desa (RKPDesa). RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa, penyusunan RKP di selesaikan paling lambat akhir bulan januari tahun anggaran sebelumnya.

Kemudian sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa. Sekertaris desa kemudian menyampaikan rancangan kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan, kemudian kepala desa membahas rancangan tersebut bersama BPD. Kemudian APBDes ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari untuk disampaikan kepada bupati/walikota. Dengan ditetapkannya APBDes, pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintah desa berdasakan APBDes.¹⁰ .

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendaptan dan Belanja Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, 240

⁹ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*,(Jakarta : Erlangga, 2011).hlm.84-86.

dan Belanja Desa bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.¹¹

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini adalah sebagian tugas dari Pemerintah Desa, namun dalam penyusunan APBDes Kepala Desa tidak lagi mendominasi dalam tahap pengajian rancangan kebijakan, pembahasan dan pelaksanaannya, karena harus melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, memperhatikan usulan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis guna membahas rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.¹²

Penyusunan APBDes di desa Madiredo ini juga melibatkan banyak lembaga di dalamnya, antara lain adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa atau BPD. Jadi dalam penyusunan APBDes di Desa madiredo ini mekanisme atau proses penyusunan awalnya adalah Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa untuk menyusun APBDes berdasarkan RKP yang telah dibuat dan disesuaikan dengan anggaran. Namun dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Madiredo ini masih terdapat banyak masalah didalamnya, misalnya BPD yang belum menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga belum menjalankan perannya dengan baik, pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran desa, SDM yang masih rendah, partisipasi masyarakat yang rendah, lemahnya koordinasi antar sector kelembagaan, tingginya anggaran pembangunan desa yang belum dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya manusia yang memiliki potensi, dan perbedaan keinginan di setiap pos atau dusun juga memperlambat penyusunan APBDes.¹³

Di jelaskan pula pada Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa peraturan desa tentang APBDes harus ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Secara implisit ketentuan ini menghendaki agar penyusunan APBDes ditetapkan lebih awal, sebelum memasuki tahun anggaran baru APBDes sudah harus ada. Terkait dengan penyusunan APBDes di desa Madiredo ini masih banyak penulis temukan beberapa masalah di dalamnya.

Sebagai tindak lanjut dari masalah-masalah dalam penyusunan APBDes ini pemerintah desa dan BPD berupaya memperbaiki sistem terkait penyusunan APBDes di Desa Madiredo dengan mengadakan pelatihan untuk lembaga pemerintahan desa yang kurang produktif, sosialisasi pemuda desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya APBDes dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan tentang penyusunan APBDes, mengadakan rapat di setiap dusun kemudian rapat desa untuk menjawab semua permasalahan yang mengakibatkan

¹¹ Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55

¹² Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4)

¹³ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2019.

perbedaan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, mengadakan pelatihan lebih kepada aparatur desa dengan cara membentuk badan pelatihan aparatur desa.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa upaya Pemerintah Desa dan BPD dalam penyusunan APBDes telah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan program Pemerintah Desa madiredo telah berjalan dengan baik.

Analisis Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan *Check and Balances*.

Prinsip *checks and balances* adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan.¹⁴ *checks and balances* adalah antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol.¹⁵ Penyusunan APBDes ini perlu kerja sama antar lembaga satu dengan yang lain, tidak hanya pembagian kekuasaan, namun juga saling membagi dan mengawasi. Untuk mengetahui apakah prinsip *checks and balances* sudah terwujud atau tidak dalam hubungan kerja ataupun upaya antara Pemerintah Desa dengan BPD, ada dua hal penting yang harus diperhatikan yakni struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dan BPD.

Gagasan utama prinsip *checks and balances* adalah upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang kekuasaan yang lain dengan tujuan mencegah dominannya suatu kelompok. *checks* digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan *balances* untuk saling membagi dan mengawasi¹⁶ Sehingga dalam upaya pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) ini prinsip *Check and Balances* sangat diperlukan agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam tugas masing-masing lembaga dan agar antar lembaga dapat saling memantau, mengimbangi dan saling mengendalikan, agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dan dalam penyusunan APBDes ini upaya pemerintah desa dan BPD dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip *check and balance*, namun dalam hal saling control masih kurang dan harus ditingkatkan lagi.

Menurut penulis *check and balance* adalah hubungan kerja sama dan pengawasan, sama seperti halnya dalam Pemerintahan di Desa Madiredo, bahwasannya antara Pemerintah desa Dengan Badan Permusyawaratan desa ini memiliki hubungan yang secara garis besar dapat nyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerjasama, dan hubungan yang bersifat pengawasan, kedua lembaga ini harus bekerjasama dan saling mengawasi dalam Penyusunan APBDes.

¹⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006). hlm 89.

¹⁵ Robert Weissberg, *Understanding American Government*, (New York, Holt Rinehart and Winston, 1979). hlm 35.dan

¹⁶ Jimmie Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).hlm.21-22.

Jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip *checks and balances* akan terwujud jika terdapat kesetaraan wewenang antara Pemerintah Desa dengan BPD Desa terutama dalam hubungan kemitraan baik dalam pembuatan kebijakan desa, keuangan desa, maupun pengawasan artinya dalam menjalankan semua tugasnya Pemerintah desa dan BPD berkedudukan seimbang atau saling bekerja sama dan mengontrol satu sama lain.

Jika dalam hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan struktur lembaga pemerintahan desa dan kewenangan yang dimiliki masing-masing, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan terwujud prinsip *checks and balances* dalam hubungan kerja. Seperti yang terjadi di dalam pemerintahan Desa Madiredo bahwasannya dalam menjalankan Pemerintahan antara Pemerintah Desa dengan BPD saling bekerja sama dalam semua program pemerintahan dan saling mengawasi satu sama lain agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul seperti masalah penyusunan APBDes.

Analisis Upaya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Persepektif Fiqh Siyasah Maliyah.

Peraturan mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak terlepas dari kondisi objektif masyarakat setempat, artinya penyusunan APBDes yang dilaksanakan di Desa Madiredo diharapkan dapat memperhatikan kebutuhan, situasi dan kemaslahatan warga desa Madiredo. Dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 31 ayat (2) bahwasannya penyusunan APBDes ini harus berdasarkan RKPDesa atau Rencana Kerja Pembangunan.¹⁷ Menurut penulis rencana kerja akan terbentuk setelah pemerintah desa telah memperhatikan kebutuhan masyarakat dan untuk kemaslahatan masyarakat. Penduduk Desa Madiredo yang mayoritasnya beragama Islam tentunya tidak mengharapkan adanya persimpangan dalam penyusunan APBDes dengan norma agama.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Madiredo telah menerapkan prinsip utama fiqh siyasah Maliyah, yakni dalam proses penyusunan APBDes telah mengutamakan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyat. Namun secara garis besar jika dilihat dari persepektif fiqh siyasah Maliyah di desa madiredo ini belum sesuai dengan konsep-konsep fiqh siyasah Maliyah, seperti mengatur keuangan juga belum dilakukan dengan baik pendapatan dan pengeluaran yang tidak di susun dengan baik, hal ini di buktikan dengan penyusunan APBDes yang lambat, dan sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Secara etimologi Siyasah Maliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum atau bersama tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat, ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya

¹⁷ Pemdagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

terhadap ekonomi, dan hal-hal yang lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.¹⁸

Menurut Al-Mawardi Fiqh Siyasah Maliyah mempunyai dua bidang kajian, antara lain :

- a. Kajian tentang pengelolaan keuangan.
- b. Kajian tentang pengelolaan Sumber Daya Alam.

Adapun jika dikaitkan dengan Penyusunan APBDes di desa Madiredo maka, Pemerintah Desa Madiredo dan lembaga-lembaga pemerintahan desa sebagai pemegang kendali upaya dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Desa harus menerapkan prinsip fiqh siyasah Maliyah ini dengan baik, sebab dalam fiqh siyasah Maliyah ini menjelaskan tentang bagaimana mengelola keuangan sebuah Negara dengan baik dan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat memajukan suatu pemerintahan dalam bidang keuangan, karena pencatatan pendapatan negara dan pengeluarannya ini sangat penting sehingga harus diatur dengan baik.

Sudah sangat jelas bahwa Fiqh Siyasah Maliyah menurut Al-Mawardi ini adalah tentang pengaturan keuangan Negara, yakni mengatur bagaimana pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, disini dapat dijelaskan bahwa bagaimana pengeluaran dan pendapatan ini dapat diatur dengan baik maka menurut penulis harus di buat pencatatan seperti yang telah di tuangkan dalam penyusunan APBDes, dan Pemerintah Desa sebagai penguasa tertinggi sebuah desa maka mempunyai kewajiban untuk mengatur segala urusan pemerintahan demi kemaslahatan masyarakatnya.

Tujuan adanya APBDes dalam hukum Islam (*maqashidu al-syari'ah*), adalah untuk menjaga umat (*hifzu alummah*), demikian pula hal ini sesuai dengan tujuan adanya pemerintahan dalam Islam. Dalam penyusunan APBDes di Desa Madiredo prinsip Fiqh Siyasah Maliyah ini sangat diperlukan yang bertujuan agar pendapatan dan pengeluaran dapat diatur dengan baik dan untuk kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dimuka maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyusunan APBDes di desa Madiredo ini dalam tahap atau sistem penyusunannya sudah sesuai dengan UU No Tahun 2014 dan setelah menyimpulkan berbagai masalah yang terjadi dalam penyusunan APBDes di desa Madiredo, maka upaya Pemerintah Desa dan BPD di desa Madiredo untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan untuk lembaga pemerintahan desa yang kurang produktif, menjadikan SKPD tingkat kecamatan sebagai lembaga pembina dan pengawas teknis penyusunan APBDes, sosialisasi pemuda desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat serta sosialisasi kepada masyarakat yang untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya APBDes dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menunjuk aparatur desa dan perwakilan lembaga desa untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan di kecamatan tentang penyusunan APBDes, mengadakan rapat di setiap dusun kemudian rapat desa untuk menjawab semua permasalahan yang mengakibatkan perbedaan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan mengadakan

¹⁸ Andri Nirwana, Fiqh Siyasah Maliyah (keungan Publik Islam), Cetakan Pertama, (Banda Aceh : SEARFIQH, 2017).hlm.6.

pelatihan lebih kepada aparaturnya, dan Penyusunan APBDes di Desa Madiredo telah menerapkan sistem kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip utama Fiqh Siyasah Maliyah.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie Jimmie.2006. "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*". Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Mahfud, Wawancara (24, Maret 2019).

Nirwana Andri. 2017. "*Fiqh Siyasah Maliyah (keungan Publik Islam)*". Banda Aceh : SEARFIQH.

Nurcholis Hanif. 2011. "*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*". Jakarta : Erlangga,

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2019

Soekanto Soerjono. 2012. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI-Press

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*.

Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Gaffar Afan. 2006. "*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*". Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Weissberg Robert. 1979. "*Understanding American Government*". New York : Holt Rinehart and Winston.

Widjaja, HAW. 2012. "*Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli,Bulat dan Utuh*". Jakarta:Rajawali Pers.